



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA KEMBANGAN**



Jalan Arjuna Utara No. 87, Jakarta Barat 11510  
Telepon (021) 56964391, Faksimile (021) 56964434, Laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200  
Surel [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
1) Tugas dan Fungsi Organisasi .....	1
2) Struktur Organisasi .....	4
3) Profil Sumber Daya Manusia .....	8
4) Sarana dan Prasarana.....	9
5) Inovasi .....	10
C. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. Sasaran Strategis.....	14
B. Indikator Kinerja .....	15
C. Perjanjian Kinerja .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran .....	41
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
D. Kinerja Lain-lain .....	42
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	44
BAB IV PENUTUP .....	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	48

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan KPP Pratama Jakarta Kembangan.

Pembuatan Laporan Kinerja tahun 2024 di KPP Pratama Jakarta Kembangan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis yang telah dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Selanjutnya, Laporan Kinerja tahun 2024 akan menjelaskan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Kinerja 2024 melalui narasi berisi data dan analisis masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Dalam mencapai target seluruh IKU, tentunya KPP Pratama Jakarta Kembangan memiliki banyak tantangan yang dihadapi selama tahun 2024. Namun, tantangan tersebut mampu dihadapi dan diselesaikan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan yang kemudian akan dijelaskan lebih mendalam beserta capaian kinerja organisasi pada Bab III laporan ini.

#### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

##### 1) Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Pajak tanggal 18 November 2020, KPP Pratama Jakarta Kembangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Kembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kembangan adalah Kecamatan Kembangan, yang meliputi 6 (enam) kelurahan yaitu Kel. Kembangan Utara, Kel. Kembangan Selatan, Kel. Meruya Utara, Kel. Meruya Selatan, Kel. Srengseng dan Kel. Joglo.

Peran strategis yang diemban tidak terlepas dari rencana kebijakan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan, yaitu mengamankan penerimaan pajak. Dalam rangka mengamankan rencana penerimaan perpajakan tersebut perlu disusun langkah strategis di berbagai bidang seperti kebijakan, peningkatan kepatuhan, dan peningkatan sumber daya manusia.

Tugas pengumpulan penerimaan pajak tahun 2024 tidak bisa dikatakan mudah. Pertumbuhan ekonomi yang terus menguat pasca pandemi Covid-19 diharapkan menjadi penopang penerimaan pajak tahun 2024. Isu perlambatan perekonomian global akibat situasi geopolitik dunia dan moderasi harga komoditas menjadi tantangan penerimaan pajak tahun ini.

Dengan tantangan yang ada, KPP Pratama Jakarta Kembangan berusaha untuk terus berkinerja maksimal mengumpulkan penerimaan pajak. Dengan

pengawasan, bimbingan dan koordinasi penuh dari pimpinan serta sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, KPP Pratama Jakarta Kembangan berusaha menjadi organisasi yang akuntabel, mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan target kinerja yang telah ditetapkan.

## **2) Struktur Organisasi**

Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Kembangan terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan yang membawahi:

### **1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

### **2. Seksi Penjaminan Kualitas Data**

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

### **3. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

#### 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

#### 5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian,

pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan perpajakan dan tindakan analisis untuk kepentingan perpajakan. Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas meliputi Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Penyidikan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak

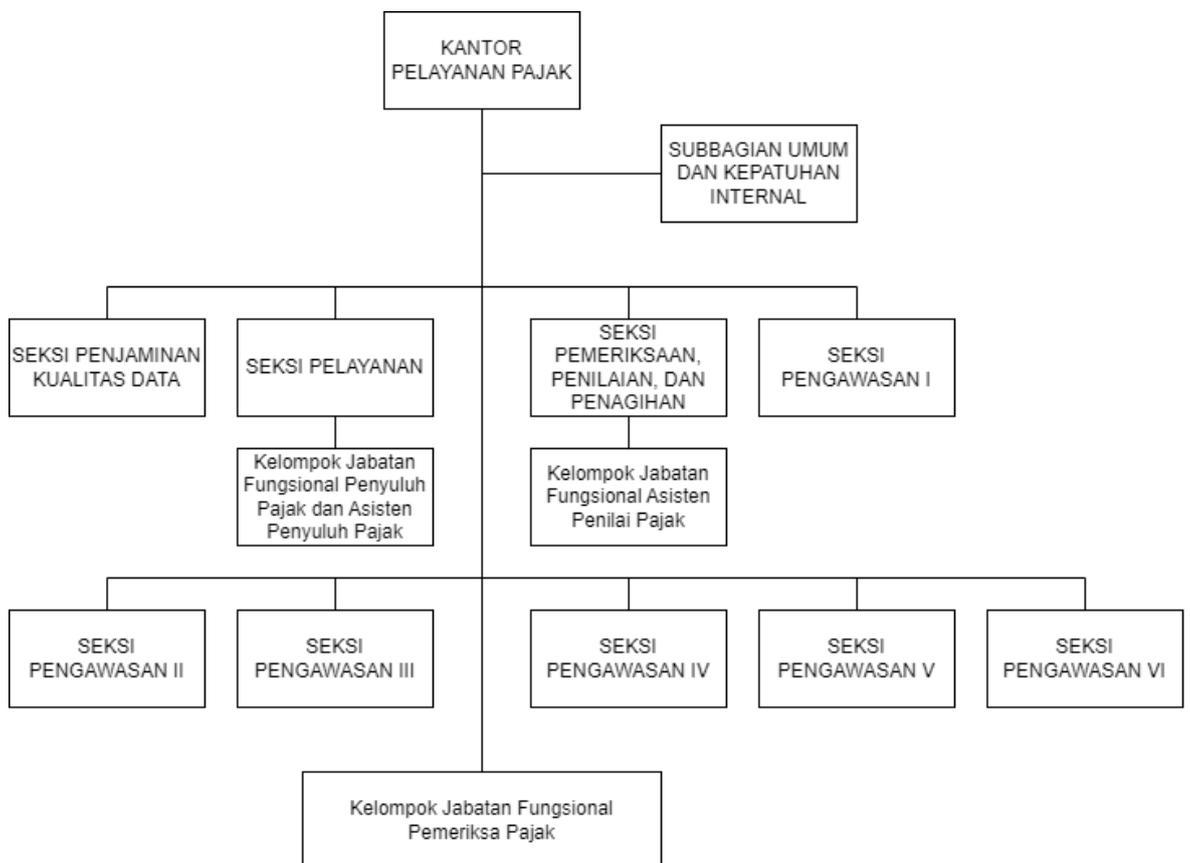
Fungsional Penyuluh Pajak mempunyai tugas untuk melakukan penyuluhan perpajakan. Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan kementerian/lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak

Fungsional Asisten Penilai Pajak merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan. Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk analisis kewajaran usaha. Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menata usahakan data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.

**Bagan 1: Struktur KPP Pratama Kembangan**



### 3) Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPP Pratama Jakarta Kembangan per 31 Desember 2024 adalah 102 orang, dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

1. Berdasarkan unit organisasi:

No.	Unit Organisasi	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9
3	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	7
4	Seksi Pelayanan	12
5	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4
6	Seksi Pengawasan I	10
7	Seksi Pengawasan II	7
8	Seksi Pengawasan III	6
9	Seksi Pengawasan IV	7
10	Seksi Pengawasan V	6
11	Seksi Pengawasan VI	6
12	Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	19
13	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak	7
14	Kelompok Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak	1
Jumlah		102 orang

2. Berdasarkan Golongan:

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	I	-	-	-
2	II	13	18	31
3	III	34	27	61
4	IV	6	4	10
Total		53	49	102

3. Berdasarkan Pendidikan:

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	SMA	1	-	1
2.	D1	10	11	21
3.	D3	10	8	18

4.	S1/D4	27	23	50
5.	S2	5	7	12
Total		53	49	102

#### 4) Sarana dan Prasarana

##### 1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Dilengkapi dengan fasilitas sistem antrean digital, loket *helpdesk*, loket layanan mandiri, brosur/ leaflet, televisi dan kamera CCTV, area bermain anak, alat pengukur suhu tubuh, *coffee corner*, dan tempat cuci tangan (protokol kesehatan).

##### 2. Fasilitas Penunjang Disabilitas

Terdapat fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti jalan dan tempat parkir khusus penyandang disabilitas, kursi roda, tongkat bantuan bagi penyandang disabilitas, kursi prioritas, loket prioritas, dan lift yang ramah penyandang disabilitas.

##### 3. Ruang Laktasi

Kantor memberikan fasilitas ruang laktasi di lantai 5 dan lantai 7 yang nyaman untuk dimanfaatkan oleh seluruh pegawai maupun Wajib Pajak yang membutuhkan.

##### 4. *Green Area Rooftop 086*

Tempat terbuka yang terletak di *rooftop* gedung kantor yang dilengkapi *Coffee Corner* dan gazebo yang dapat dimanfaatkan seluruh pegawai untuk bekerja dan berdiskusi secara santai dan nyaman.

##### 5. *Jamming Room*

Tempat untuk berlatih dan berkreasi musik.

##### 6. Studio Ceria

Studio untuk menciptakan konten audio visual dalam rangka edukasi dan penyuluhan pajak.

##### 7. *Legacy Hall*

Aula serba guna yang menjadi tempat bagi seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka meningkatkan sinergi dan profesionalitas kerjaserta area untuk memberikan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi kepada para Wajib Pajak.

8. *Flexibel Working Space*

Tempat kerja yang santai dan nyaman yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai untuk bekerja dilengkapi dengan kursi dan meja yang nyaman yang berada di lantai.

9. Klinik Kembangan Sehat

Ruang konsultasi kesehatan dengan dokter yang berada di lantai 7 dan dilengkapi dengan *hospital bed*, alat pengukur tekanan darah, timbangan berat badan, dan alat pengecek kandungan darah.

10. Musala

Tempat beribadah bagi pegawai muslim yang terletak di lantai 2.

## 5) Inovasi

1. Percepatan e-Pbk

Percepatan pemrosesan permohonan pemindahbukuan menjadi kurang dari 10 hari kerja untuk meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak.

2. E-Koran (Elektronik Kotak Saran)

Saluran bagi pengguna layanan untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan secara elektronik kepada KPP Pratama Jakarta Kembangan untuk meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak.

3. Rapat Pembinaan Mingguan (RPM)

Rapat yang dilaksanakan setiap hari Senin dalam rangka penyampaian arahan pimpinan, monitoring dan evaluasi target kinerja organisasi.

4. Monitoring Aktivitas dan Evaluasi Capaian Kinerja (MANDALIKA)

Sarana monitoring dan evaluasi capaian target kinerja organisasi yang disajikan dalam bentuk tabel, narasi, maupun grafik berdasarkan hasil pengolahan data.

5. BARA

*Breakdown* Rencana Penerimaan Per AR Per Jenis Pajak Per Bulan dalam bentuk kertas kerja *Excel*.

6. Bela (Bel Bantuan Disabilitas)

Alat Bantuan khusus oleh petugas bagi penyandang disabilitas.

7. PIN 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)

Simbol layanan tulus prima dari petugas TPT kepada seluruh Wajib Pajak saat melakukan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi.

8. Kembang Desa (Kembangan Dandan, Elok, dan Bersahaja)

*Beauty Class*, Bilik SIAP di *back office* TPT, dan penyediaan cermin serta alat *makeup* untuk meningkatkan penampilan dan performa pegawai dalam melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak.

9. Riski (Rincian Slip Tukin)

Rincian tunjangan kinerja pegawai yang dikirim melalui email masing-masing pegawai setiap bulan.

10. Ruang KePo (Kembangan *Podcast*)

Wadah kreativitas dan inovasi pegawai untuk menciptakan konten audio visual baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan pelayanan dan penyuluhan.

11. Citra (Cipta Kreativitas Ruangan)

Merapikan dan menghias ruangan kerja sesuai dengan tema tertentu.

12. Kontak086

Pusat informasi kontak seluruh pegawai yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

13. *One Stop* SUKI (OSS)

Pusat informasi layanan di Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang dapat diakses seluruh pegawai dengan mudah dan cepat.

14. Ngopi 086 (Ngobrol Hepi)

*Morning Activity* yang dibawakan dengan santai oleh seluruh pegawai secara bergantian. Ngopi 086 merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan sebagai ajang untuk berkumpulnya seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Kembangan, berbagi pengalaman dan *sharing* pengetahuan, serta mendengar arahan dari pimpinan.

15. Pojok Antigratifikasi

Sebagai pusat informasi dan media kampanye untuk mencegah praktik gratifikasi.

16. Tangga Istimewa

Tempat untuk memajang prestasi yang telah diperoleh baik oleh kantor maupun pegawai secara individu sebagai sarana apresiasi dan motivasi kepada seluruh pegawai.

17. *Green Area Rooftop*

Ruang terbuka sebagai tempat berkumpul, berolahraga, berdiskusi, menyendiri, refleksi, dan mencari inspirasi.

18. *Frontliner of the Month*

Penghargaan kepada pegawai *frontliner* terbaik setiap bulan untuk mengapresiasi kinerja dan meningkatkan motivasi kerja pegawai.

19. Kembangan *Checklist* (KECE)

Lembar daftar periksa dokumen sebagai sarana pengendalian tambahan dalam rangka pengawasan pemenuhan ketentuan formal pelaksanaan proses bisnis.

20. Klinik Kembangan Sehat

Fasilitas pemeriksaan kesehatan pegawai oleh dokter umum yang dilakukan secara berkala secara langsung di kantor dalam rangka membantu menjaga dan memantau kesehatan pegawai.

#### 21. Monitoring Anggaran SIK dan SPD (MONASS)

Kertas kerja Excel untuk mengetahui saldo anggaran SPD dan SIK serta membantu perencanaan perjalanan dinas biasa maupun dalam kota.

#### 22. Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Integritas Mandiri

Survei kepada Wajib Pajak penerima layanan melalui pengisian formulir *online* yang meliputi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

#### 23. Komitmen Antigratifikasi dalam Surat Tugas

Penambahan kalimat komitmen dan/atau kampanye antigratifikasi dalam setiap Surat Tugas ke Wajib Pajak dan pemangku kepentingan lainnya.

### **C. Sistematika Laporan**

Laporan kinerja ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang dibuatnya laporan, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, profil SDM organisasi, sarana prasarana, dan inovasi yang ada di KPP Pratama Jakarta Kembangan.
- 2) Bab II Perencanaan Kinerja, berisi perencanaan Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta IKU yang ada di KPP Pratama Jakarta Kembangan.
- 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja, berisi data, analisis, dan narasi terkait Capaian Kinerja Organisasi yang menjelaskan capaian untuk setiap IKU, realisasi anggaran tahun 2024, efisiensi sumber daya, penghargaan, dan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja di KPP Pratama Jakarta Kembangan.
- 4) Bab IV Penutup, berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Sasaran Strategis

Rencana Strategis KPP Pratama Jakarta Kembangan sudah ditetapkan di awal tahun 2024 dalam bentuk Kontrak Kinerja yang disusun oleh Kepala Kantor. Kontrak Kinerja menggambarkan target-target kinerja dari KPP Pratama yang bertugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.” dan berjalan beriringan pula dengan salah satu misi Direktorat Jenderal Pajak “meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil”.

Visi dan misi DJP tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan program operasional. Dalam rangka mengukur pencapaian visi dan misi DJP, telah ditetapkan indikator-indikator kinerja utama (IKU) sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

## **B. Indikator Kinerja**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak;
- b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
- c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
- d. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
- e. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
- f. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
- g. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan;
- h. Persentase pengawasan pembayaran masa;
- i. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- j. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
- k. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
- l. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
- m. Tingkat efektivitas penagihan;

- n. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- o. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan;
- p. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM;
- q. Indeks Penilaian Integritas Unit;
- r. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko; dan
- s. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

### C. Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kembangan:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
		Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7.	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%

		Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kembangan telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian sasaran strategis organisasi tersebut. Pencapaian kinerja organisasi tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi			Indeks Capaian
				2024	2023	2022	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	101.08%	103.50%	110,10%	101.08
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	94.98	119.00	151,15	94.98
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	101.19%	106.52%	117,37%	101.19
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	106.23%	100.70%	111,57%	106.23
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian	100.00%	100.26%	70.31%	95,38%	100.26

		Kepatuhan Material (PKM)					
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	84.00%	80,40%	120.00
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00	111.27	83.11	87,81	111.27
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	111.57%	108.30%	103,07%	120.00
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00%	120%	120.00
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	118.42%	120.00%	IKU Baru	118.42
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	118.93%	IKU Baru	IKU Baru	118.93
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	106.86%	111,75%	120.00
		Efektivitas Penagihan	75.00%	111.05%	89.01%	111,28%	120.00
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	200.00%	IKU Baru	IKU Baru	120.00
8	Data dan Informasi	Persentase penyelesaian laporan	100.00%	120.00%	120.00%	122,40%	120.00

	yang berkualitas	pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan					
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	105.83	IKU Baru	IKU Baru	105.83
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	97.72	95.69	94,36	114.96
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	98.91	IKU Baru	IKU Baru	109.9
10	Pengelolaan Keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	93.60	93,17	120.00
Nilai Kinerja Organisasi					106.70	111.54	<b>108.43</b>

## Uraian Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Sasaran Strategis 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

#### a) Indikator Kinerja Utama 1: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Target penerimaan pajak tahun 2024 mengalami perubahan beberapa kali. Pada awal tahun target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp 4.615.099.365.030. Kemudian pada bulan April 2024 target tersebut direvisi menjadi sebesar Rp4.591.129.458.010.

Target tersebut kemudian direvisi beberapa kali, hingga terakhir target penerimaan pajak menjadi Rp3.398.450.077.000. Pada akhir tahun target penerimaan berhasil tercapai Rp3.434.987.314.970 atau sebesar 101,08% dari target yang telah direvisi. Pencapaian penerimaan tahun 2024 ini menjadi tantangan yang sangat besar, namun dengan strategi manajemen restitusi yang baik, pemanfaatan potensi data dan *extra effort* yang kuat serta sinergi dan kerja sama yang baik dari

seluruh pegawai dan pemangku kepentingan, KPP Pratama Jakarta Kembangan berhasil mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Kembangan tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar 102,36%, 110,10% dan 103,50%. Artinya capaian penerimaan pajak tahun 2024 melanjutkan tren positif dan berhasil mencapai *quattrick* tercapai penerimaan pajak empat tahun berturut-turut.

Salah satu upaya strategi yang menunjang pencapaian penerimaan pajak adalah penerapan Empat Pilar Kunci Sukses sebagai strategi keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak yaitu:

1. jumlah Wajib Pajak bayar naik meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran diukur dengan *cr (coverage ratio)* antara jumlah Wajib Pajak bayar terhadap Wajib Pajak terdaftar.
2. keteraturan Wajib Pajak bayar naik upaya pengawasan pembayaran masa yang mendorong Wajib Pajak membayar teratur sesuai dengan jenis kewajiban pajaknya (*payment of compliance*).
3. kewajaran Wajib Pajak bayar naik upaya pengawasan kepatuhan material agar Wajib Pajak membayar wajar sesuai dengan keadaan yang sebesarnya (*strength of figure*).
4. kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagai hasil upaya edukasi dan penyuluhan serta ekstensifikasi yang berkesinambungan akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan pengusaha kena pajak terdaftar.

**b) Indikator Kinerja Utama 2: Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas dengan bobot masing-masing komponen adalah 50% dalam menyumbang pencapaian

IKU. Realisasi indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 94,98 dari target 100 sehingga indeks capaian IKU tersebut mendapat angka 94,98%. Capaian tahun 2024 turun dari tahun 2023 yang sempat mencapai angka tertinggi di angka 119,00%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh berakhirnya masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Beberapa program yang telah dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target yaitu:

- melakukan proyeksi prognosa dengan lebih presisi,
- koordinasi yang lebih intensif dalam menentukan prognosa pencairan tindakan penagihan, pemeriksaan dan pengawasan,
- manajemen restitusi yang lebih terencana,
- kegiatan PPM melalui STP dan himbauan,
- kegiatan PKM pengawasan yang optimal,
- kegiatan penagihan aktif,
- pemeriksaan yang efektif, dan
- edukasi yang maksimal.

## **2. Sasaran Strategis 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi**

### **a) Indikator Kinerja Utama 3: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 sebesar Rp3.010.120.107.680 atau sebesar 101,19% dari target yang

ditetapkan sebesar Rp2.974.746.024.000 sehingga indeks capaian IKU tersebut sebesar 101,19%. Capaian tahun 2024 ini melanjutkan tren positif dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2024 sebesar 101,19% dan tahun 2023 sebesar 106,52%.

Beberapa program yang telah dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target yaitu:

- Melakukan penelitian dan menerbitkan imbauan dinamisasi berdasarkan daftar nominatif melalui aplikasi *Approweb*,
- Menyusun konsep LHP2DK berdasarkan analisis tanggapan Wajib Pajak untuk SP2DK atas data selain tahun pajak berjalan yang telah terbit,
- Menerbitkan SP2DK untuk menindaklanjuti Daftar Penugasan Sasaran Ekstensifikasi (DSPE) melalui aplikasi SIDJP NINE,
- Meneliti dan menerbitkan imbauan dan/atau SP2DK atas data pemicu tahun berjalan,
- Pengawasan Faktur yang terbit 2024 dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN,
- Pengawasan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, dan
- Pengawasan WP yg seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP karena omzet melebihi 4,8 M.

**b) Indikator Kinerja Utama 4: Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

Realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dari target Wajib Pajak wajib SPT sebesar 62.166 terealisasi sebesar 47.895 atau sebesar dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga indeks capaian IKU tersebut sebesar 106,23%. Sementara itu, realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tahun 2022 dan 2023 sebesar 111,57% dan 100,70%. Target yang ditetapkan naik dari tahun sebelumnya dan berhasil terealisasi lebih dari 100%, hal ini menunjukkan melanjutkan tren positif pencapaian pasca pandemi Covid-19. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan adalah dengan melaksanakan kegiatan berupa pembukaan pojok pajak di mall dan perumahan, mengadakan kelas pajak daring, mengadakan siaran langsung sosialisasi melalui *Instagram*, membuat *podcast* perpajakan melalui *Youtube*, *himbauan melalui Whatsapp blast* dan *email blast*, infografis di media sosial, pemasangan spanduk di lokasi-lokasi strategis, penerbitan surat teguran, dan meningkatkan koordinasi serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan pemberi kerja.

Kegiatan yang dilakukan di atas berlangsung dengan baik dan realisasi target kepatuhan dapat melampaui target. Rencana aksi ke depan adalah segera menginformasikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan sebelum batas waktu pelaporan dan memberikan asistensi pelaporan SPT Tahunan dengan sebaik-baiknya.

### **3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi**

#### **a) Indikator Kinerja Utama 5: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 sebesar Rp 424.826.010.639 atau sebesar 100,26% dari target yang harus dicapai sebesar Rp423.704.053.000. Realisasi tahun 2024 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 70,31% dan 2022 sebesar 95,38%.

Atas pencapaian realisasi tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk bisa mendongkrak capaian target yang telah ditetapkan, antara lain:

- Pengawasan:
  1. menindaklanjuti data *approweb* tahun berjalan,
  2. menindaklanjuti daftar nominatif STP dan data pemicu/data penguji selain tahun berjalan,
  3. melakukan pengawasan pembayaran masa,
  4. menindaklanjuti Wajib Pajak PPS yang batal reinvestasi untuk melakukan pembayaran,
  5. menerbitkan SP2DK untuk Wajib Pajak DPP dan imbauan untuk Wajib Pajak di luar DPP,
  6. mempercepat penyelesaian DPP 2024 dan SP2DK *outstanding*,
  7. menyelesaikan pemeriksaan data konkret,
  8. berkomunikasi aktif kepada Wajib Pajak, serta melakukan kunjungan jika diperlukan,
  9. melaksanakan kegiatan KPDL, dan
  10. memperbarui data DRM dan memanfaatkan data DDRM.
- Penagihan:
  1. melakukan monitoring berkala setiap minggu atas ketetapan/ produk hukum yang akan daluwarsa pada tahun 2024,
  2. menggencarkan pencetakan surat teguran dan surat paksa untuk setiap ketetapan yang sudah bisa ditegur dan dipaksa secara konsisten,

3. mengundang Wajib Pajak untuk hadir ke KPP dan melakukan konsultasi setelah disampaikannya surat paksa,
  4. fokus menindaklanjuti tindakan penagihan aktif pada tahap pemblokiran dan penyitaan, dan
  5. monitoring dan reminder atas Wajib Pajak komitmen secara berkala.
- Pemeriksaan:
    1. menyelesaikan tunggakan pemeriksaan yang jatuh tempo yaitu SPT LB PPH Badan tahun pajak 2023,
    2. segera menyelesaikan pemeriksaan SPT PPN Restitusi sebelum jatuh tempo penetapan,
    3. Daftar Prioritas Penyelesaian Pemeriksaan Khusus (DSPP) yang akan daluwarsa penetapan serta yang mempunyai potensi cair dalam tahun berjalan,
    4. mempercepat penyelesaian kegiatan pemeriksaan atas tunggakan pemeriksaan dengan usia SP2 di atas 8 bulan,
    5. mengawal SKP hasil pemeriksaan yang disetujui untuk segera dilakukan pembayaran, dan
    6. percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan sebelum implementasi *coretax* per tanggal 30 Juli 2024, paling lambat bulan Oktober tahun 2024,

#### **4. Sasaran Strategis 4: Edukasi dan Pelayanan Yang Efektif**

##### **a) Indikator Kinerja Utama 6: Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan**

Formula IKU persentase perubahan perilaku laporkan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dipengaruhi oleh tiga rasio, yaitu rasio kegiatan, rasio perubahan perilaku laporkan, dan rasio perubahan perilaku bayar. Pada tahun 2024 jumlah realisasi atas kegiatan 344.14% dengan proporsi rasio sebesar 18,50%, jumlah realisasi atas perubahan perilaku bayar 90,37% dengan proporsi rasio

sebesar 42,18% dan jumlah realisasi atas perubahan perilaku lapor 115,93% dengan proporsi rasio sebesar 28,12%.

Dari jumlah target kegiatan penyuluhan yang ditetapkan sebanyak 58 kali, jumlah realisasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan adalah sebanyak 58 kali.

Sehingga capaian IKU sebesar 120% dengan target 74% sehingga capaian IKU mencapai maksimal sebesar 120%. Realisasi tahun 2024 ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang sebesar 84,00% dan terdapat kenaikan target dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan tersebut dilakukan secara berkala sesuai rencana kerja dan fokus meningkatkan kegiatan edukasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Bendahara dan Wajib Pajak Asosiasi yang potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam mencapai target indikator kinerja utama ini, beberapa upaya telah dilakukan, yaitu:

- Melakukan *filterisasi* data Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan secara berkala untuk dijadikan sasaran kegiatan edukasi dan bimtek terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan,
- Memberikan konsultasi terkait SPT Tahunan kepada Wajib Pajak baik tatap muka maupun melalui daring,
- Melakukan olah data dari daftar Wajib Pajak yang memiliki data tunggakan pajak untuk dijadikan sasaran edukasi *One to Many* ataupun *One on One*,
- Melakukan kegiatan edukasi *One on One* kepada Wajib Pajak DSPT ataupun CRM yang terdapat potensi pajak belum terbayarkan,

Pencapaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diperoleh dari hasil pemilihan sasaran edukasi yang tepat sehingga dapat menghasilkan perubahan perilaku lapor ataupun bayar yang

maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan edukasi yang dapat menunjang pencapaian target adalah:

- Kegiatan edukasi pelaporan SPT Tahunan dengan sasaran Wajib Pajak yang telah mendapatkan teguran atas kewajiban pelaporan yang belum dilakukan.
- Kegiatan edukasi terkait penyelesaian tunggakan pajak dengan sasaran Wajib Pajak yang telah diterbitkan STP, utamanya Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat teguran.

Menyikapi hasil dari pencapaian target ini, maka telah disusun dalam Rencana Kerja Penyuluhan tahun 2025 dengan menambahkan kegiatan edukasi *one on one* kepada Wajib Pajak yang berdasarkan hasil penelitian mandiri atau hasil konsultasi terdapat potensi pembayaran pajak yang belum disetorkan.

**b) Indikator Kinerja Utama 7: Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan**

Pada IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan dilaksanakan untuk mengetahui kualitas pelayanan Wajib Pajak atau *stakeholders* melalui hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan. Nilai Indeks Pelayanan diperoleh sebesar 90,63 dan Indeks Efektivitas Penyuluhan sebesar 99,50 sehingga diperoleh realisasi IKU sebesar 96,75 dan capaian IKU sebesar 120,00%. Realisasi Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 83,11 dan tahun 2022 sebesar 87,81. Kegiatan sosialisasi/ penyuluhan tersebut dilakukan secara berkala sesuai rencana kerja dan fokus pemberian sosialisasi kepada Wajib Pajak yang potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sementara dalam efektivitas pelayanan dilakukan baik dengan tatap muka secara langsung dengan pembatasan demi pencegahan dan protokol kesehatan dengan memanfaatkan aplikasi *kunjung.pajak.go.id*, dan saluran lain baik berupa *chat*, telepon, media sosial, dan *email* KPP Pratama Jakarta Kembangan. Pemberian layanan dari tahun ke tahun diupayakan lebih baik lagi sehingga Wajib Pajak (WP) bisa menunaikan kewajiban

perpajakannya dengan semakin baik dan merasa terbantu dengan asistensi maupun sosialisasi yang diberikan. Tahun 2024, kami berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Dalam mencapai target indikator kinerja utama ini, beberapa upaya telah dilakukan, yaitu:

- Melakukan kegiatan edukasi *one to many* dan *one on one* melebihi target yang ditetapkan,
- Melakukan pengawasan atas perubahan perilaku bayar dan lapor untuk peserta kegiatan edukasi tema 3,
- Meng-*input* setiap hasil kegiatan pada aplikasi SISULUH,
- Selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, dan
- Memberikan sarana konsultasi daring untuk setiap jenis layanan.

Pencapaian IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan diperoleh dari hasil survei kepuasan layanan yang diisi oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu pencapaian hasil IKU yang di atas target merupakan cerminan dari layanan dan edukasi yang diberikan kepada Wajib Pajak. Pemberian pelayanan prima, penyelesaian permohonan Wajib Pajak tepat waktu serta pelaksanaan kegiatan edukasi yang menarik dan bermanfaat adalah wujud aksi yang telah dilakukan dalam menunjang pencapaian IKU ini.

Mempelajari bahwa pengisian tautan survei indeks kepuasan layanan menjadi titik penting dalam pencapaian IKU ini maka dalam rencana kerja untuk tahun 2024 telah disusun beberapa aksi yang diharapkan dapat meningkatkan pencapaian IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Adapun aksi tersebut dapat dituangkan sebagai berikut:

- Tetap melakukan kegiatan *edukasi one to many* dan *one on one* diupayakan melebihi target yang ditetapkan,

- Melakukan pengawasan atas perubahan perilaku bayar dan lapor untuk peserta kegiatan edukasi tema 3,
- Menyampaikan tautan survei kepuasan layanan pada saat melakukan kegiatan edukasi,
- Menyampaikan tautan survei evaluasi edukasi setelah selesai melakukan kegiatan edukasi, dan
- Berupaya meningkatkan kualitas layanan dan kegiatan edukasi kepada Wajib Pajak.

Dengan berbagai aksi tersebut diharapkan pencapaian indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan untuk tahun 2024 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya hingga memperoleh pencapaian maksimal.

## **5. Sasaran Strategis 5: Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif**

### **a) Indikator Kinerja Utama 8: Persentase Pengawasan Pembayaran Masa**

IKU Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Realisasi IKU persentase Pengawasan Pembayaran Masa tahun 2024 adalah sebesar 111,57% dari target 90% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%. Terdapat dua komponen yang diperhitungkan yaitu capaian realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang masing-masing memiliki bobot 50%. Realisasi Strategis menyumbangkan angka sebesar 119,73%, sedangkan Kewilayahan menyumbangkan realisasi sebesar 120,00%. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan

tahun 2023 sebesar 108,30% dan tahun 2022 sebesar 103,07% dengan target yang sama. Dalam mencapai realisasi terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu Wajib Pajak yang masih belum rutin melakukan pembayaran masa. Untuk menghadapi tantangan dan mencapai realisasi dilakukan beberapa program yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. pemanfaatan aplikasi Matoa, Engine dan aplikasi lainnya,
2. melakukan kegiatan KPDL, dan
3. melakukan pengawasan pembayaran masa dan mengimbau Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tepat waktu, baik melalui surat maupun *whatsapp blast*.

## **6. Sasaran Strategis 6: Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif**

### **a) Indikator Kinerja Utama 9: Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya atau Kewilayahan (bobot 50%).

dengan tujuan untuk optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Realisasi penyelesaian IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 mencapai angka maksimal sebesar 120% dari target 100% dengan capaian sebesar 120%. Dalam hal ini, realisasi IKU P4DK melanjutkan tren positif dari tahun 2023 sebesar 120% dan tahun 2022 sebesar 120%. Meskipun KPP

Pratama Jakarta Kembangan menghadapi tantangan dalam mencapai IKU ini karena rendahnya respon Wajib Pajak atas SP2DK, akan tetapi KPP Pratama Jakarta Kembangan mampu mencapai realisasi maksimal dan mempertahankan capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa upaya yang menunjang keberhasilan antara lain:

- memastikan SP2DK sampai kepada Wajib Pajak melalui komunikasi aktif;
- melakukan kegiatan kunjungan kepada Wajib Pajak;
- melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak untuk memberikan klarifikasi atas data dan/atau keterangan; dan
- melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk merealisasikan IKU P4DK dilakukan dengan menggunakan aplikasi APPROWEB.

Untuk mempertahankan capaian IKU pada tahun 2025, KPP Pratama Jakarta Kembangan akan terus melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan/atau tempat usaha Wajib Pajak dengan prioritas terhadap Wajib Pajak yang terdapat dalam DPP untuk memahami pekerjaan dan/atau kegiatan usaha Wajib Pajak secara mendetail untuk Wajib Pajak Strategis. Selain itu, juga melakukan penggalian potensi Wajib Pajak Sektoral sesuai prioritas nasional untuk DPP tahun 2025 dan melakukan penerbitan SP2DK serta pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka pembahasan P2DK.

#### **b) Indikator Kinerja Utama 10: Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *matching*. IKU ini memiliki tujuan di KPP untuk optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak dan tindak lanjut temuan BPK atas data STP.

Realisasi IKU ini untuk tahun 2024 adalah sebesar 118,42% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 118,42%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%, maka realisasi pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dengan kendala berupa masih terdapat data pemicu yang belum valid dan tidak dapat ditindaklanjuti. Meskipun begitu, KPP Pratama Jakarta Kembangan telah melakukan tindakan optimal untuk mencapai realisasi tersebut dengan upaya sebagai berikut:

- menyesuaikan jumlah potensi DPP yang diusulkan untuk ditindaklanjuti;
- melakukan penyesuaian dengan menambah atau mengurangi DPP yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat;
- menindaklanjuti DPP yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat dengan menerbitkan SP2DK;
- menerbitkan SP2DK atas DPP *mandatory* 2024; dan
- menerbitkan imbauan untuk menindaklanjuti data selain tahun berjalan.

**c) Indikator Kinerja Utama 11: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2024. Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang bertujuan memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari:

- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%);
- Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%);

- Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%).

Realisasi untuk IKI ini pada tahun 2024 adalah 118.93% dari target 100% dengan capaian 118.93%. Capaian ini tentunya didukung dengan beberapa upaya yaitu:

- rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP;
- melakukan koordinasi antar seksi terkait; dan
- menyusun laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan KPP tepat waktu.

Untuk meningkatkan realisasi IKU pada tahun 2025, terdapat rencana aksi yang akan dilakukan dengan adanya rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak rutin dan secara aktif mengusulkan bahan baku pemeriksaan melalui DSP2 kolaboratif maupun DSP2 mandiri.

## **7. Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum yang Efektif**

### **a) Indikator Kinerja Utama 12: Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Kemudian, Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. IKU efektivitas pemeriksaan dan penilaian dinilai melalui dua komponen, yaitu 60% komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan 40% komponen tingkat efektivitas penilaian.

Hasil realisasi pada tahun 2024 sebesar 120,00% dari target 100,00% dengan capaian IKU sebesar 120,00%. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 106.86% dari target 80% dan di tahun 2022 dengan realisasi sebesar 111,75% dari target 80%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU mengalami tren positif dalam dua tahun terakhir dan mencapai

capaian yang maksimal. Dalam mencapai realisasi tersebut, tentunya terdapat tantangan yang tidak mudah yaitu adanya potensi penerimaan pajak yang diusulkan di DSPP lebih tinggi daripada hasil pemeriksaan dan banyaknya permohonan restitusi untuk jenis pajak PPN per masa. KPP Pratama Jakarta Kembangan melakukan tindakan dalam menghadapi tantangan dan dalam mencapai capaian maksimal dengan,

- melakukan manajemen restitusi terkait pemeriksaan;
- berkomunikasi secara aktif dalam Komite Kepatuhan untuk mencapai DSPP yang efektif;
- mempercepat penyelesaian pemeriksaan sehingga ruang terbit menjadi positif;
- melakukan komunikasi aktif dengan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas jumlah SKPKB yang disetujui sebelum jatuh tempo;
- mengimbau Wajib Pajak untuk memanfaatkan PMK-08; dan
- mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan yang terdampak *coretax* sesuai ND-286/PJ.04/2024.

**b) Indikator Kinerja Utama 13: Tingkat Efektivitas Penagihan**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak dengan 3 (tiga) variabel penilaian yaitu tindakan penagihan, tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), dan pencairan DSPC.

Pada tahun 2024, realisasi tingkat efektivitas penagihan sebesar 111,05% dari target sebesar 75% sehingga capaian IKU adalah sebesar 120%. Apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023 tingkat efektivitas

penagihan memiliki realisasi sebesar 89,01% dari target 75% dan di tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 111,28% dari target sebesar 75%, maka di tahun 2024 realisasi mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 dengan capaian IKU yang maksimal. Realisasi yang menurun di tahun 2023 disebabkan karena adanya kegiatan penyanderaan dan kurangnya jumlah Jurusita. Namun, di tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kembangan berhasil meningkatkan realisasi efektivitas penagihan meskipun memiliki tantangan dengan adanya beban pekerjaan terkait DSTP. Beberapa hal berikut dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi tantangan dan mencapai capaian yang maksimal:

- Memaksimalkan pencetakan Surat Teguran meskipun IKU sudah tercapai;
- Melakukan monitoring kohir yang akan daluwarsa pada tahun 2024 sesuai dengan tindakan terakhir;
- Secara persuasif mengundang Wajib Pajak setelah Surat Paksa disampaikan;
- Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dan berkolaborasi dengan Fungsional Penyuluh Pajak dan AR;
- Fokus terhadap Wajib Pajak yang diusulkan dalam DSPC;
- Melakukan penagihan pajak terhadap 100 penunggak pajak terbesar yang berada dalam DSPC; dan
- Meningkatkan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran, penyitaan, dan lelang.

**c) Indikator Kinerja Utama 14: Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *case building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi dari IKU penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 adalah 200% dari target 100% dengan capaian sebesar 120%. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 dengan target adalah 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kembangan telah menyampaikan 2 (dua) dokumen usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui nota dinas dan telah disetujui oleh Kanwil DJP Jakarta Barat untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal ini menunjukkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

## **8. Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang Berkualitas**

### **a) Indikator Kinerja Utama 15: Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 sebesar 120% dari target 100% dengan capaian 120%. IKU ini dihitung melalui dua komponen penilaian, yaitu penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 120% dari target 100% dan tahun 2022 sebesar 122,40% dari target 100%, kinerja IKU penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tetap konsisten positif dengan capaian 120%. Hal ini dicapai dengan koordinasi aktif antara Kepala Seksi

Pengawasan dengan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data dan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan penelitian dan mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan,
- Kemudian, melakukan pengamatan kepada Wajib Pajak, dan
- Menyelesaikan pembuatan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu.

**9. Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif**

**a) Indikator Kinerja Utama 16: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

Untuk menghitung IKU ini dibagi menjadi dua komponen penilaian, yaitu komponen kualitas kompetensi dengan bobot 50% dan komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dengan bobot 50%. Dalam komponen kompetensi terdapat tiga aspek yang menjadi penilaian, yaitu tingkat pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural, tingkat pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional, dan tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Selanjutnya, dalam komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM terdapat tiga aspek yang menjadi penilaian, yaitu pelaksanaan kegiatan kebintalan, kuesioner kegiatan kebintalan, dan kepatuhan pelaporan. IKU ini merupakan IKU baru yang dilakukan di tahun 2024.

Pada tahun 2024 realisasi IKU ini sebesar 105,83 dari target 100 dengan capaian sebesar 105,83% yang menunjukkan capaian yang positif. Pencapaian IKU tersebut didukung dengan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- Membuat rencana program Kebintalan SDM dan melaksanakan kegiatan pembinaan mental yang meliputi empat bidang, yaitu bidang ideologi, rohani,

kompetensi, dan kejiwaan yang selaras dengan kegiatan ICV dan kegiatan pendukung lainnya.

- Melaksanakan *In House Training* (IHT)
- Melakukan himbauan serta monitoring atas penyelesaian *e-learning* KLC dan Studia yang diselenggarakan oleh KPP, Kanwil, maupun kantor pusat.

**b) Indikator Kinerja Utama 17: Indeks Penilaian Integritas Unit**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

KPP Pratama Jakarta Kembangan tahun 2024 mendapatkan realisasi sebesar 97,72 dari target 85 dengan capaian 114,96%. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 95,69 dari target 85 dan tahun 2022 memiliki realisasi 94,36 dari target 85. Hal ini menunjukkan capaian yang positif selama dua tahun terakhir.

Dalam pencapaian IKU terdapat tantangan, yaitu Wajib Pajak yang diajukan dalam *longlist* responden tidak seluruhnya menerima dan mengisi survei yang telah dikirimkan melalui email karena data email yang belum diperbarui oleh Wajib Pajak. Atas permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan mengumpulkan dan menyampaikan data *longlist* responden dengan tepat dan lengkap, serta memonitor dan menghubungi seluruh Wajib Pajak yang terdapat dalam *longlist* responden sehingga target survei dapat tercapai.

**c) Indikator Kinerja Utama 18: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko**

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja;
- Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja.

Sedangkan Efektivitas Manajemen Risiko dihitung menggunakan formula Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko dibagi Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko dikali 100%. Realisasi IKU ini terdiri dari penjumlahan Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko. IKU ini merupakan IKU baru yang ada dilakukan pada tahun 2024. Tahun 2024 IKU ini mendapatkan realisasi sebesar 98,91 dari target sebesar 90 dengan capaian 109,9%.

Capaian ini ditunjang dengan upaya monitoring dan pengawasan capaian NKO melalui:

1. pelaksanaan rapat pembahasan manajemen risiko, realisasi manajemen risiko, dan adendum risiko fraud,
2. rapat DKRO dan NKO dengan tepat waktu dan efektif, dan
3. penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan.

## **10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan keuangan yang Akuntabel**

### **a) Indikator Kinerja Utama 19: Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Realisasi tahun 2024 mencapai realisasi yang maksimal, yaitu 120 dari target sebesar 100. Jika dibandingkan dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dari realisasi tahun 2023 sebesar 93,60 dan realisasi tahun 2022 sebesar 93,17. Realisasi yang didapat tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Kembangan untuk

mencapai target IKU yang ditentukan. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kembangan dalam mencapai realisasi, yaitu:

- berkoordinasi dengan KPPN dan Kantor Wilayah DJPB terkait dengan pengisian capaian output dan seksi terkait untuk menentukan target dan realisasi,
- telah melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Triwulan III untuk mencapai target penyerapan yang dituju,
- berkoordinasi dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjaga target pengeluaran bulanan sesuai dengan deviasi minimal, dan
- melakukan perhitungan kembali atas anggaran perjalanan dinas untuk mendukung penyerapan anggaran apabila terdapat sisa dana.

Atas evaluasi yang telah dilakukan terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan agar target IKU tetap tercapai maksimal pada masa mendatang, yaitu melakukan revisi anggaran dan koordinasi dengan KPA, PPK, dan PBJ agar penyerapan dapat berjalan dengan maksimal.

## **B. Realisasi Anggaran**

Anggaran DIPA KPP Pratama Jakarta Kembangan tahun 2024 sebesar Rp5.598.386.000. Adapun dari anggaran belanja DIPA tersebut, yang dialokasikan untuk keperluan Ekstensifikasi Penerimaan Negara sebesar Rp566.609.000, pelaksanaan Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi sebesar Rp173.364.000, Pengawasan dan Penegakan Hukum sebesar Rp284.836.000, Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum sebesar Rp3.627.886.000, dan Pengelolaan Organisasi dan SDM sebesar Rp945.691.000.

Realisasi Anggaran terhadap keperluan Ekstensifikasi Penerimaan Negara sebesar Rp564.736.523 atau 99.67%, pelaksanaan Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi sebesar Rp167.835.594 atau 96.81%, Pengawasan dan Penegakan Hukum

sebesar Rp281.624.734 atau 98.87%, Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum sebesar Rp3.545.278.877 atau 97.72%, dan Pengelolaan Organisasi dan SDM sebesar Rp865.652.000 atau 91.54%. Sehingga penyerapan DIPA adalah sebesar Rp5.425.127.728 atau 96.91%. Jumlah SPM yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mencapai 256 SPM.

### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan pada tahun 2024 yang dilakukan di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) memanfaatkan penggunaan aplikasi satu kemenkeu khususnya dalam persuratan untuk mendukung penerapan *paperless* dan menghemat ruang penyimpanan berkas secara fisik;
- b) melakukan kegiatan implementasi program Internalisasi *Corporate Value* maupun imbauan manajemen kinerja dengan memanfaatkan *microsoft teams* dalam hal pemberian sosialisasi dan *in house training* secara daring untuk efisiensi waktu dan efisiensi administrasi rapat;
- c) memanfaatkan *cloud Onedrive* untuk melakukan pengarsipan berkas kepegawaian yang memberikan efisiensi ruang penyimpanan dan kemudahan akses berkas dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data;
- d) memanfaatkan teknologi dengan adanya inovasi Kontak086, *One Stop Suki*, MONASS, Riski, dan KECE yang dapat memudahkan pegawai dalam monitoring administrasi terkait kepegawaian, keuangan, dan proses bisnis.

### D. Kinerja Lain-lain

Pada dua tahun terakhir, dengan kerja keras seluruh pegawai dibarengi dengan kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, KPP Pratama Jakarta

Kembangan mendapat berbagai penghargaan yang dicapai pada tahun 2023 dan 2024 antara lain:

1. KPP dengan Pencapaian Penerimaan Pajak di atas 100% di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 (103,49%);
2. Peringkat II KPP dengan Pertumbuhan Penerimaan non PPS tertinggi di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 (53,91%);
3. Peringkat III KPP dengan Pertumbuhan PKM Tertinggi di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 (29,20%)
4. Juara III Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023;
5. Peringkat I Fungsional Penyuluh Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 atas nama Lia Amsalia Amir;
6. Peringkat III Anggota Tim Fungsional Pemeriksa Pajak Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 atas nama Adityas Nova Firdausi;
7. Peringkat III Account Representative Kewilayahan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Tahun 2023 atas nama Irmayanty;
8. Account Representative Terfavorit di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 atas nama Theresia Wahyuningsih;
9. Pelaksana KPP Terfavorit di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 atas nama Meisinta Salsabila;
10. Juara I Cabor Futsal Piala Kemerdekaan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023;
11. Juara I Cabor Ganda Campuran Tenis Lapangan Piala Kemerdekaan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 atas nama Sutisna dan Shintia Yuniana;

12. Juara III Cabor Panahan Putri Piala Kemerdekaan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 atas nama Misbahul Husna, Dwi Ulfa R, dan Sri Amaliyah;
13. Juara III Cabor Catur Putri Piala Kemerdekaan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2023 atas nama Anis Nuril Fuadah;
14. Juara II Lomba Kultum Akhwat Salahuddin Fest – Ramadan 1444H/ 2023 atas nama Lia Amsalia Amir;
15. Juara II Lomba Hifdzil Qur'an Dewasa Akhwat Salahuddin Fest – Ramadan 1444H/ 2023 atas nama Eliyanah;
16. Juara I IG Reels Salahuddin Fest – Ramadan 1444H/ 2023 atas nama Arin Adinda;
17. Juara II Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2024;
18. Juara II Billiard Pekan Olahraga dan Kesenian (POK) Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2024;
19. Juara II Futsal Pekan Olahraga dan Kesenian (POK) Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2024;
20. Juara II EA SPORTS FC24 Pekan Olahraga dan Kesenian (POK) Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2024;
21. Juara II MLBB Pekan Olahraga dan Kesenian (POK) Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2024; dan
22. Juara II Band Pekan Olahraga dan Kesenian (POK) Kanwil DJP Jakarta Barat Tahun 2024.

## **E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPP Pratama Jakarta Kembangan telah melaksanakan pengujian kepatuhan internal atas kegiatan proses bisnis yang dijalankan oleh Manajemen Operasional. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) atas kegiatan proses bisnis dengan proses *sampling* setiap bulan. Dalam proses pengujian kepatuhan ditemukan permasalahan/temuan, UKI menindaklanjuti hasil pengujian proses bisnis kegiatan pemeriksaan pajak dengan menyampaikan rekomendasi hasil pengujian kepatuhan internal kepada Tim Pemeriksa Pajak melalui nota dinas Kepala Kantor nomor ND-164/KPP.0511/2024 tanggal 24 September 2024 yang bertujuan agar menjadi evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada kegiatan pemeriksaan pajak untuk selalu berpedoman pada ketentuan terkait prosedur dan tata cara pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan selanjutnya, dan menyelesaikan pemeriksaan pajak yang telah mendekati jatuh tempo pengujian dan pembahasan.

## BAB IV

### PENUTUP

Keberhasilan KPP Pratama Jakarta Kembangan tahun 2024 dalam memenuhi target penerimaan yang dibebankan sebesar 101,08% dengan total realisasi penerimaan sebesar Rp3.434.987.314.970. Keseluruhan capaian kinerja dari indikator kinerja utama yang telah ditargetkan pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kembangan berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,43.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat berturut-turut KPP Pratama Jakarta Kembangan mencapai target penerimaan lebih dari 100%, setelah sebelumnya tahun 2021, 2022, dan 2023 telah berhasil mencapai target penerimaan. Lebih dari itu, pada tahun 2024, dilakukan revisi target penerimaan pajak hingga lima kali yang pada akhir tahun KPP Pratama Jakarta Kembangan berhasil melebihi target yang telah diamanahkan.

Selain itu, pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kembangan mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Terbaik Kedua di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat. Hasil pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya dan komitmen KPP Pratama Jakarta Kembangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak dan pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas. Hal tersebut juga menjadi sebuah motivasi dan pendorong bagi KPP Pratama Jakarta Kembangan untuk terus melakukan perbaikan dan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak maupun pemangku kepentingan.

Berbagai pencapaian KPP Pratama Jakarta Kembangan tahun 2024 merupakan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan kerja keras dari seluruh pegawai yang berkomitmen melaksanakan program-program yang telah direncanakan, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kemudian, dalam rangka mempertahankan indikator kinerja utama yang telah tercapai dan meningkatkan kinerja untuk masa mendatang, KPP Pratama Jakarta Kembangan merencanakan evaluasi sejumlah program yang sudah ada dan peningkatan dengan program

yang lebih intensif baik di dalam maupun di luar kantor dalam hal pelayanan kepada Wajib Pajak, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan demi tercapainya target penerimaan yang ditetapkan di tahun 2025.

KPP Pratama Jakarta Kembangan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada Wajib Pajak dan meningkatkan kinerja organisasi melalui keberlanjutan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan pencanangan program pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) pada tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kembangan ini dibuat dengan sebaik-baiknya untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

Jakarta, 24 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Judiana Manihuruk

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024; dan
2. Data Kepegawaian KPP Pratama Jakarta Kembangan 31 Desember 2024.